



WAKSINASI MASSAL DI UBUD: Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada masyarakat di kawasan Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (16/3). Kegiatan vaksinasi massal tersebut dilakukan kepada ratusan orang dari berbagai komponen masyarakat untuk mencegah penyebaran Pandemi Covid-19 sekaligus sebagai upaya mewujudkan kawasan Ubud sebagai salah satu dari tiga zona hijau Covid-19 yang disiapkan dibuka kembali untuk pariwisata.

KR-Antara/Fikri Yusuf

Dilakukan Pengetatan dan 'Tracing' Mudik Idul Fitri Tidak Dilarang

JAKARTA (KR) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) 1442 Hijriyah/2021 Masehi ini. Namun dengan catatan melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.

Hal tersebut dikatakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (16/3). "Terkait dengan mudik pada 2021, pada prinsipnya Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang," kata Menhub Budi Karya.

Meski begitu dijelaskannya, untuk menunjang kebijakan tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dan sinergi bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dengan melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.

Selain itu, lanjut Budi Karya, Kemenhub mengeluarkan

beberapa kebijakan penyelenggaraan Angkutan Lebaran. Di antaranya terus mensosialisasikan protokol kesehatan (prokes) secara ketat mulai dari tempat keberangkatan, selama perjalanan, sampai di tempat kedatangan.

Kemudian menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, udara, memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan ketertiban dan keamanan pada simpul-simpul transportasi, melaksanakan koordinasi intensif dengan pemangku kepen-

tingan antara lain Korlantas Polri, PUPR, Jasa Marga, Pemda, hingga operator jasa transportasi dengan membentuk posko-posko bersama.

Selain itu melakukan rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Angkutan Lebaran. Dan, melakukan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran dimulai dari persiapan sampai pascapelaksanaan.

* Bersambung hal 7 kol 5

Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran :

- Melaksanakan protokol kesehatan (prokes) secara ketat mulai keberangkatan, sampai kedatangan.
- Menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, udara.
- Memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi dan keamanan.
- Menjaga ketertiban dan keamanan.
- Koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan dengan membentuk posko-posko bersama.
- Rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Angkutan Lebaran.
- Monitoring serta evaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran.

Sumber: Kemenhub



ILUSTRASI JOS

Analisis KR Tiga Periode

Prof Dr Bagong Suyanto



WACANA memperpanjang masa jabatan Presiden hingga tiga periode kembali mencuat. Isu yang menyulut polemik. Meski Presiden Joko Widodo sendiri telah berkali-kali menegaskan tidak berminat untuk mencalonkan dan memperpanjang jabatan karena melanggar konstitusi. Bahkan presiden dalam sebuah pernyataannya tegas menyebutkan : penghembus isu kalau tidak menjerumuskan, motifnya adalah untuk menjilat.

Kalau mengacu pada pemikiran filsuf anti-sistem Nietzsche, dalam kehidupan manusia yang terjadi biasanya adalah kekuasaan akan makin mempriadi dan orang cenderung akan mempertahankan kekuasaan untuk kepentingan dirinya. Hasrat manusia, menurut Nietzsche adalah 'kehendak untuk berkuasa'. Manusia tidak senang diperintah, dan lebih senang memerintah.

Dalam dunia politik, tidak ada yang salah jika seseorang ingin mempertahankan kekuasaan. Tetapi, sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan yang terlalu mempriadi dan terus diperpanjang ternyata rawan mengidap penyimpangan.

Sejarah orde baru telah mengajarkan, Presiden yang berkuasa hingga 30 tahun lebih, bukannya melahirkan kesejahteraan masyarakat yang makin baik, tetapi justru melahirkan

* Bersambung hal 7 kol 1

MUI KELUARKAN FATWA Vaksinasi Covid-19 Tak Batalan Puasa

JAKARTA (KR) - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa. Komisi Fatwa MUI telah menetapkan fatwa, vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular tidak mem-

batalan puasa.

Ketua Bidang Fatwa MUI Kiai Asrorun Niam Sholeh mengatakan, vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi

* Bersambung hal 7 kol 1

Belanja Kebutuhan wajib PATUHI PROKES COVID-19

DATA KASUS COVID-19
Selasa, 16 Maret 2021

KONSULTASI DOCCALL
KONSULTASI DOKTER LEWAT VIDEO CALL
Hotline : 0811 803 7770 - 0274 550059/60

0274 550059/60 0812682229 @happyland

RS PKU Bantul
Melayani **SWAB ANTIGEN RAPID ANTIGEN** 24 JAM

Pendaftaran 08123 638 678

1. Nasional:	- Pasien positif : 1.430.458 (+5.414)	- Pasien sembuh : 1.257.663 (+7.716)	- Pasien meninggal : 38.753 (+180)
2. DIY:	- Pasien positif : 30.427 (+170)	- Pasien sembuh : 25.050 (+213)	- Pasien meninggal : 738 (+6)

Sumber: Satuan Tugas/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Pemda DIY. (KR-Ria/Ira)

SESUAI UU NO 10/2016 Pilkada 2024 Konsisten Dijalankan

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dilaksanakan konsisten sesuai Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016.

"Kami dari Kemendagri berpendapat, pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024," kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Selasa (16/3).

Tito menilai, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 merupakan amanat UU untuk konsisten dijalankan. Dengan demikian, perbaikan dapat dilakukan pascapelaksanaan, bukan sebelum Pilkada dilaksanakan. "Kita harus konsisten, UU ini kita ikuti, kita jalankan untuk pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024, kita bisa revisi setelah kita laksanakan, bukan sebelum kita laksanakan," tegasnya.

Dalam UU No 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat 8 disebutkan, pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Tak kalah penting, Mendagri menilai, tata kelola dan manajemen dalam pelaksanaan pesta demokrasi menjadi kunci pelaksanaan pilkada yang sukses. Berkaca pada Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:50	15:01	17:54	19:03	04:28

Rabu, 17 Maret 2021 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

DOMPET 'KR'
Bersama Kita Melawan Virus Korona
Migunani Tumraping Liyan

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ibu para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BCA 126.556.5656 atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA 081 2296 0972.

Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

NO	NAMA	ALAMAT	RUPIAH
851	KPS (Komunitas Perupa Sleman)		2,500,000.00
	JUMLAH		Rp 2,500,000.00
	s/d 15 Maret 2021		Rp 453,800,000.00
	s/d 16 Maret 2021		Rp 456,300,000.00

(Empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)

(Siapa menyusul?)

MASUKI BULAN RAMADAN

Pemerintah Jamin Bahan Pokok Tak Naik

JAKARTA (KR) - Pemerintah menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok (Bapak) tersedia dan mencukupi dengan harga terjangkau untuk Ramadan dan Lebaran 2021. Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menghintung, menganalisis, mengendalikan, dan mengecek rencana guna memastikan suplai cukup. Sehingga, harga bisa diprediksi dan tetap stabil.

"Dari hasil pantauan kami secara nasional, menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini, ketersediaan serta harga bapak terpantau aman dan stabil. Kementerian Perdagangan telah melakukan koordinasi secara intensif dengan asosiasi produksi, penjual, distribusi, dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya guna memastikan keterse-

diaan bapak nasional," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, di Jakarta, Selasa (16/3).

Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini beberapa komoditas seperti beras dan gula menjadi perhatian pe-

merintah untuk diantisipasi stabilitas harga dan kecukupan pasokannya. "Menjelang Ramadan

dan Lebaran, dapat dipastikan harga komoditas tersebut akan stabil.

* Bersambung hal 7 kol 5



KR-Antara/Oky Lukmansyah

Buruh membersihkan bawang merah di Desa Klampok, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (16/3). Menurut petani setempat, harga bawang merah sebulan terakhir naik dari Rp 17.000 menjadi Rp 22.000/kg karena meningkatnya permintaan dan sedikitnya stok pada musim hujan.

SUNGGUH SUNGGUH Terjadi

• SAAT ibu hendak berbelanja ke pasar, adik saya yang sedang flu minta dibelikan tisu. Sepulang dari pasar, setelah mengecek barang belanjaan, ibu minta maaf. Mungkin penjual salah dengar suara ibu yang memakai masker, sehingga bukan tisu yang didapat tetapi susu. (Karunia Sylviany Sambas, RSUD Dr Tengku Mansyur Jalan Mayjend Sutoyo 39 Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai Sumatera Utara 21313)-d